

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia perekonomian dan pasar modal, pengungkapan laporan keuangan menjadi salah satu isu penting. Pengungkapan dianggap penting karena bagi *stakeholder*, investor, maupun para pemakai informasi laporan keuangan menilai bahwa laporan keuangan adalah salah satu sumber utama informasi dalam membuat keputusan untuk menentukan tujuan mereka. Selain itu, dunia perekonomian yang dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang pesat, membuat banyak perusahaan berada pada persaingan bisnis yang ketat. Hal tersebut mendorong setiap perusahaan untuk terbuka dalam mengungkapkan informasi tentang perusahaannya dimana informasi tersebut sudah mencakup informasi laporan keuangan. Dalam mengungkapkan informasi tentang perusahaan, laporan perusahaan yang diungkap dapat berupa laporan keuangan tahunan.

Keterbukaan pengungkapan laporan keuangan sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan, terutama bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum kepada publik. Aturan dalam pengungkapan wajib juga sangat diperlukan didalam laporan keuangan guna melindungi investor, *stakeholder*, dan para pengguna informasi dari kecurangan perusahaan yang dimana perusahaan tersebut menyembunyikan informasi penting perusahaan yang harus diungkapkan kepada publik. Apabila aturan tersebut tidak dibuat atau tidak ada, perusahaan akan menyembunyikan hal-hal penting tentang perusahaannya dan akan merugikan

para pemakai informasi laporan keuangan maupun *stakeholder*. Pernyataan ini didukung oleh adanya fenomena terkait pengungkapan laporan keuangan dimana ada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang pengungkapannya tidak cukup luas dan dapat berdampak kerugian bagi *stakeholder*.

Tabel 1.1
Hasil Indeks Pengungkapan Wajib

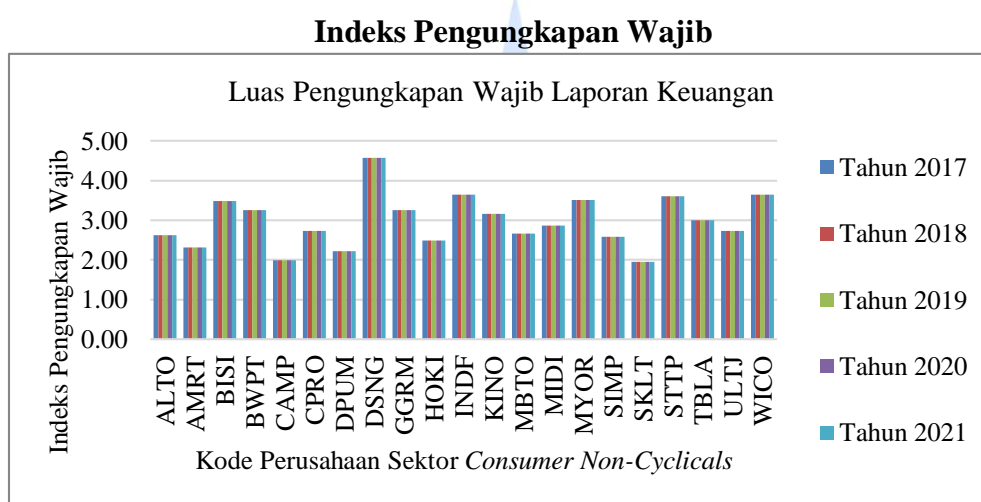
No	Kode Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i>	Indeks Pengungkapan				
		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	ALTO	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
2.	AMRT	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
3.	BISI	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
4.	BWPT	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
5.	CAMP	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
6.	CPRO	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
7.	DPUM	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
8.	DSNG	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
9.	GGRM	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
10.	HOKI	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
11.	INDF	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
12.	KINO	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
13.	MBTO	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
14.	MIDI	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
15.	MYOR	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
16.	SIMP	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
17.	SKLT	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
18.	STTP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
19.	TBLA	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
20.	ULTJ	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
21.	WICO	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65

Sumber: Data sekunder diolah (2023)

Pada tabel 1.1, ditunjukkan indeks pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan-perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap dari tahun 2017-2021 dan memiliki kepemilikan saham pihak manajerial sekaligus saham publik selama tahun 2017-2021. Dari tabel 1.1, terlihat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Campina Ice Cream Industry Tbk. (CAMP), PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM), dan PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) selama tahun 2017-2021 memiliki indeks di sekitar angka 1,50 sampai 2,40. Dapat terlihat juga indeks PT Tri Banyan Tirta Tbk. (ALTO), PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT), PT Central Proteina Prima Tbk. (CPRO), PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI), PT Kino Indonesia Tbk. (KINO), PT Martina Berto Tbk. (MBTO), PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI), PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP), PT Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA), dan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. (ULTJ) di sekitar angka 2,50 sampai 3,40. Lalu, indeks pengungkapan wajib PT BISI International Tbk. (BISI), PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF), PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), PT Siantar Top Tbk. (STTP), dan PT Wicaksana Overseas Internation Tbk. (WICO) di sekitar angka 3,50 sampai 4,40 keatas. Angka indeks pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan berbeda-beda dikarenakan setiap perusahaan memiliki tingkat rasio keuangan, kepemilikan saham, dan jumlah aset yang berbeda dengan lainnya yang dimana faktor-faktor tersebut membuat perusahaan terdorong untuk sangat terbuka atau tidak terbuka dalam pengungkapannya dan

menghasilkan angka indeks yang menunjukkan luas atau tidak luasnya pengungkapan informasi perusahaan.

Gambar 1.1



Sumber: Data sekunder diolah (2023)

Selain tabel 1.1 yang menunjukkan angka indeks pengungkapan wajib tiap perusahaan, terdapat juga gambar 1.1 yang menunjukkan tinggi rendahnya indeks pengungkapan wajib laporan keuangan tiap perusahaan. Berdasarkan gambar 1.1, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Campina Ice Cream Industry Tbk. (CAMP), PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM), dan PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) memiliki grafik indeks pengungkapan wajib laporan keuangan yang rendah. Lalu, PT Tri Banyan Tirta Tbk. (ALTO), PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT), PT Central Proteina Prima Tbk. (CPRO), PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI), PT Kino Indonesia Tbk. (KINO), PT Martina Berto Tbk. (MBTO), PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI), PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP), PT Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA), dan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. (ULTJ)

memiliki grafik indeks pengungkapan wajib laporan keuangan yang cukup tinggi. Kemudian, PT BISI International Tbk. (BISI), PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF), PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), PT Siantar Top Tbk. (STTP), dan PT Wicaksana Overseas International Tbk. (WICO) memiliki grafik indeks pengungkapan wajib laporan keuangan yang tinggi. Dari grafik tinggi rendahnya indeks pengungkapan tersebut dapat dibuktikan bahwa perusahaan yang seharusnya mengungkapkan informasinya secara luas masih terdapat perusahaan seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Campina Ice Cream Industry Tbk. (CAMP), PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM), dan PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) yang mengungkapkan pengungkapan wajib nya secara kurang luas atau kurang lengkap karena memiliki indeks pengungkapan wajib laporan keuangan yang rendah.

Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses akuntansi yang fungsinya sebagai alat untuk menjelaskan data keuangan hingga segala aktivitas perusahaan . Laporan keuangan selalu dijadikan dasar penilaian oleh para investor dalam menilai kondisi perusahaan sebelum melakukan penanaman modal di perusahaan (Ummah dan Asyik, 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Trisanti dan Zulaikha (2012) laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan merupakan suatu informasi formal yang wajib dipublikasikan sebagai jendela informasi yang memungkinkan pihak-pihak eksternal manajemen mendapatkan informasi tentang perusahaan dan sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemegang saham. Dalam hal ini, perusahaan harus sangat transparan membuat informasi didalam laporan keuangan yang sangat

membantu para pemakai informasi laporan keuangan dalam mengambil keputusan secara optimal.

Perusahaan dalam proses pembuatan informasi laporan keuangan tidak akan bisa terlepas dari kelengkapan pengungkapan. Penelitian yang dilakukan oleh Ummah dan Asyik (2017) pengungkapan memiliki arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi beserta penjelasannya yang cukup mengenai hasil aktivitas dari suatu kondisi keuangan kepada para pemakai informasi laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disertai dengan beberapa materi penjelasan kualitatif dan kuantitatif dari laporan keuangan tersebut. Bila tingkat kelengkapan pengungkapan laporan semakin tinggi, maka semakin luas informasi yang diperoleh dan semakin yakin dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna informasi laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2020) laporan keuangan dalam perusahaan ada dua kelompok yakni pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengungkapan wajib mewajibkan perusahaan *go public* untuk mengungkap informasi perusahaannya agar meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para pemangku kepentingan atau pengguna informasi di pasar modal. Kewajiban pengungkapan informasi bagi perusahaan *go public* diatur oleh OJK berdasarkan keputusan ketua

Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) (Purba dkk., 2019).

Peraturan yang mengatur tentang pengungkapan wajib laporan keuangan sangat diperlukan dan diperhatikan karena dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan pihak pengguna informasi perusahaan. Peraturan terkait pengungkapan wajib sering mengalami perubahan kebijakan dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan. Perubahan tersebut adalah perubahan mengenai isi laporan tahunan dan bentuk penyampaian laporannya sehingga perubahan peraturan mengenai pengungkapan wajib menunjukkan betapa pentingnya luas pengungkapan informasi laporan tahunan bagi perusahaan, investor, *stakeholder*, dan para pengguna informasi laporan keuangan.

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan, khususnya perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di pasar modal sangat penting dilakukan. Sebab, pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor penting, melihat manfaatnya sebagai sarana akuntabilitas publik. Pengungkapan laporan keuangan yang secara terbuka, jujur, dan lengkap membuat kebutuhan informasi pengambilan keputusan *stakeholder* terpenuhi sehingga penelitian tentang pengungkapan akan membantu para pemakai informasi laporan keuangan memperoleh banyak petunjuk tentang kondisi perusahaan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Faktor pertama dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan wajib yaitu likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang mengukur

seberapa besar perusahaan mampu melunasi liabilitas (hutang) jangka pendeknya yang mendekati jatuh tempo (Hery, 2016). Tingginya rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup yang mendorong perusahaan melakukan pengungkapan laporan keuangan secara luas untuk menunjukkan kemampuannya yang dianggap dapat menarik perhatian para pengguna informasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati dkk. (2018), Tran dkk. (2020), dan Pattisahusiwa dkk. (2022) bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, karena perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih luas kepada pihak eksternal untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan tersebut. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ummah dan Asyik (2017) dimana likuiditas berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan, karena tingkat likuiditas yang tinggi maupun rendah, perusahaan akan tetap meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya.

Faktor kedua dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan wajib yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan dananya melalui hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra dkk. (2021) perusahaan yang memiliki rasio hutang (*leverage*) tinggi memiliki motivasi untuk mengungkapkan informasi lebih luas dibandingkan perusahaan yang memiliki rasio hutang rendah. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati dkk. (2018), Purba dkk. (2019), dan Pamungkas (2020) yang menunjukkan bahwa solvabilitas atau *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan tahunan,

karena tingginya rasio hutang (liabilitas) perusahaan memberikan sinyal negatif akibat asimetri informasi tentang liabilitas perusahaan kepada *stakeholder* sehingga mendorong perusahaan mengungkapkan lebih luas untuk mengurangi persepsi negatif dan asimetri informasi tersebut. Namun, tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ummah dan Asyik (2017), Abbas dkk. (2020), dan Martha dan Prisilia (2021) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan, karena perusahaan mempublikasikan liabilitasnya hanya sebatas pos laporan perusahaan kepada kreditur atau investor sehingga perusahaan tidak terdorong mengungkapkan item-item secara lengkap.

Faktor ketiga dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan wajib yakni *return on asset*. *Return on asset* adalah salah satu pengukuran profitabilitas untuk menilai besarnya kinerja manajer perusahaan dalam menghasilkan laba (Purba dkk., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Purba dkk. (2019) menjelaskan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka perusahaan termotivasi mengungkapkan informasi seluas mungkin untuk menunjukkan kinerja manajernya yang produktif kepada investor. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ummah dan Asyik (2017), Purba dkk. (2019), dan Azzahra dkk. (2021) bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan, karena profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan mampu memberikan pengembalian dana investasi yang tinggi yang menarik perhatian investor sehingga perusahaan termotivasi mengungkapkan laporan keuangan secara luas.

Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati dkk. (2018) dan Pattisahusiwa dkk. (2022) *return on asset* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan, karena ketika tingkat laba perusahaan sedang tinggi maka tidak perlu mengungkapkan selengkap-lengkapannya yang dapat mengganggu informasi tentang keuangan perusahaan.

Faktor keempat dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan wajib yaitu kepemilikan saham pihak manajerial. Kepemilikan saham pihak manajerial yaitu proporsi saham yang berasal dari direktur, manajer, dan komisaris perusahaan yang ikut serta ambil bagian dalam pengambilan keputusan (Kristiana, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Musaffa (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi maka tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan juga semakin tinggi. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sefty dan Farihah (2016) dan Musaffa (2017) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, karena pihak manajerial yang memiliki saham perusahaan menunjukkan manajer memiliki insentif lebih besar dalam monitoring yang mengurangi terjadinya kecurangan pengungkapan laporan keuangan. Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arisanti dkk. (2021) dan Kristiana (2016) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan, karena jika pihak internal termasuk pihak manajer perusahaan memiliki saham yang besar maka pihak internal tersebut menjadi pemilik saham pengendali yang aksesnya lebih besar

daripada pemilik saham non-pengendali yang menyebabkan disinsentif bagi perusahaan dalam pengungkapan publik.

Faktor kelima dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan wajib yaitu kepemilikan publik. Kepemilikan publik merupakan jumlah saham yang dimiliki masyarakat didalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan saham publik maka semakin banyak pihak membutuhkan informasi perusahaan yang mengakibatkan perusahaan dituntut untuk lebih luas mengungkapkan informasi keuangannya (Khairudin dan Anggita, 2018). Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Budiasih (2016), Fauzia dan Rahmawati (2017), Khairudin dan Anggita (2018), dan Arisanti dkk. (2021) bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib, karena besarnya kepemilikan saham publik menyebabkan banyak permintaan dan tuntutan item informasi laporan tahunan secara *detail* oleh investor. Namun, tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pattisahusiwa dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib, karena kepemilikan saham publik mayoritas dikuasai oleh kalangan keluarga dan umumnya adalah investor kecil sehingga memungkinkan perusahaan untuk tidak mengungkapkan informasinya secara luas.

Faktor keenam dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan wajib yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu instrumen untuk mengukur besar kecilnya aset perusahaan (Purba dkk., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) menyatakan bahwa secara

umum perusahaan besar lebih banyak mengungkapkan informasi dibandingkan perusahaan kecil. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dkk. (2016), Sefty dan Farihah (2016), Larasati dkk. (2018), Tran dkk. (2020), dan Pattisahusiwa dkk. (2022) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib, karena perusahaan besar memiliki sumber daya manusia yang memadai yang menunjukkan perusahaan mampu membiayai penyediaan informasi agar menghasilkan pengungkapan informasi yang luas untuk keperluan internal dan eksternal. Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarsyah dan Kurnia (2014) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib, karena perusahaan besar belum pasti mengungkapkan informasi yang luas sebab adanya pertimbangan biaya pengungkapan informasi dan perusahaan harus efisien dan efektif dalam mengungkapkan informasi tersebut.

Penelitian ini adalah sebuah replikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Abbas dkk. (2020) dengan objek penelitian perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi yaitu pada sektor perusahaan dan periode penelitian dimana penelitian ini meneliti perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* tahun 2017 sampai tahun 2021. Hal ini dikarenakan agar data yang diperoleh dapat diolah ke alat statistik dan menghasilkan data penelitian yang relevan. Selain itu, penelitian ini

menambahkan tiga variabel independen yakni kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan.

Alasan peneliti menambah variabel kepemilikan manajerial yaitu dikarenakan manajer yang menanamkan sahamnya pada perusahaan tidak ingin mengalami kerugian sehingga manajer akan selalu berusaha mengungkapkan informasi perusahaan secara luas untuk kepentingan pribadi manajer. Selain itu, alasan peneliti menambah variabel kepemilikan publik adalah karena perusahaan yang terdapat kepemilikan saham publik menunjukkan perusahaan selalu mendapat tuntutan untuk mengungkapkan informasi secara luas agar kebutuhan informasi publik terpenuhi. Lalu, alasan peneliti menambah variabel ukuran perusahaan adalah karena besar kecilnya perusahaan menunjukkan besar kecilnya aset perusahaan yang dapat menciptakan memadainya sumber daya manusia perusahaan dalam mengungkapkan informasi secara luas.

Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di BEI telah berstatus *go public*. Perusahaan *go public* selalu melakukan transaksi jual beli saham ke publik yang menuntut perusahaan untuk mengungkapkan pengungkapan wajib laporan keuangannya secara luas. Lalu, kontribusi perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang selalu meningkat, memotivasi manajemennya mengelola semua sumber daya perusahaan secara transparan yang menciptakan keterbukaan informasi sebagai peluang perusahaan untuk memajukan perusahaannya melalui pihak *stakeholder* sehingga peneliti memilih perusahaan sektor *consumer non-*

cyclicals yang terdaftar di BEI karena ingin mencari kebenaran apakah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* dapat mengungkapkan pengungkapan wajib laporan keuangannya secara luas kepada publik apabila kondisi ekonomi perusahaan sedang tidak stabil.

Oleh karena terdapat perbedaan variabel-variabel yang mempengaruhi luas pengungkapan wajib laporan keuangan dan perbedaan periode penelitian, maka judul yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu **“PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, RETURN ON ASSET, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN PUBLIK, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR *CONSUMER NON-CYCLICALS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu:

1. Data perusahaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Peneliti hanya berfokus pada pengaruh likuiditas, *leverage*, *return on asset*, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan (studi empiris pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021).

1.3. Perumusan Masalah

Pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan yang tidak luas maupun kurang luas menunjukkan perusahaan tersebut tidak terbuka dalam mengungkapkan informasi perusahaannya. Tidak luasnya pengungkapan wajib laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan para pengguna laporan keuangan khususnya *stakeholder* dan investor. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangannya sehingga dari pengungkapan wajib laporan keuangan yang tidak luas para pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan kedepannya dan menilai kualitas perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu pengkajian kembali terkait beberapa faktor yang bisa mempengaruhi luas pengungkapan wajib laporan keuangan supaya menjadi bahan informasi yang akurat bagi perusahaan untuk dapat memperluas pengungkapan wajib laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dijabarkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan.
3. Untuk menguji pengaruh *return on asset* terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan.

5. Untuk menguji pengaruh kepemilikan publik terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan.
6. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi:

1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan secara jujur sesuai kondisi perusahaan dan menyediakan laporan keuangan secara jelas kepada penggunanya sehingga para pemakai informasi laporan akan terbantu dalam membuat keputusan yang tepat.

2. Calon Investor atau Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para calon investor maupun investor dalam menentukan keputusan berinvestasi di suatu perusahaan melalui luas pengungkapan wajib laporan keuangan.

3. Dunia Pendidikan dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan referensi tentang luas pengungkapan wajib laporan keuangan.

4. Peneliti Berikutnya

Hasil dalam penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan referensi dan bacaan untuk membantu peneliti berikutnya melakukan penelitian di masa yang akan datang mengenai luas pengungkapan wajib laporan keuangan.